

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alink, Mattijs dan Victor van kommer (editor). *handbook for tax administrations: Organizational Structure and Management of Tax Administrations*. The Netherlands: Koninklijke Vermande / Inter-American Center of Tax Administrations. 2000.
- Australian Master Tax Guide 2001-32nd edition, CCH Australian limited, 2001
- Bailey, Kenneth D. *Methods of Social Research, Fourth Edition*. New York: The Free Press. 1994
- Barata, Adya, Atep dan jajat Djuhadiat. *Pemotongan dan Pemungutan PPh & KPLN*. 2004.
- Brotodihardjo, R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003
- Burns, Lee and Richard Krever, *Taxation of Income from Business and Investment*, dalam *Tax Law Design and Drafting*, Edited by Victor Thuronyi, Washington D.C, International Monetary Fund, 1998, Volume 2
- Bryman, Alan. *Quantity and Quality in Social Research*. New York : The Free Press. 1988.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approach*. California: Sage Publication. 1994.
- Darussalam dan Dani Septriadi. *membatasi kekuasaan untuk mengenakan pajak: Suatu tinjauan Akademis terhadap kebijakan, Hukum, dan Administrasi Pajak di Indonesia*. Jakarta: Grasindo. 2006.
- Faria, Angelo G.A. dan Zohto Yocelik. 'The Interrelationship Between Tax Policy and Tax Administration 'dalam Parthasarathi Shome (Editor). *Tax Policy Handbook*. Washington DC: Tax Policy Division Fiscal Affairs Departement International Monetary Fund. 1995.
- Gunadi. *ketentuan perhitungan & Perlakuan PPh*. Jakarta: Salemba Empat. 2002.
- Mankiw, N.Gregory. *Principle of Microeconomics*. Third Edition. Singapore: Thomson South-Western. 2004.

- Mardiasmo. *Perpajakan*. Andi Yogyakarta. 1995.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya). 2004.
- Neuman, Wiliam Lawrence. *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Aproache*. fourth edition. USA: Allyin & Bacon. 2000.
- Nurmantu, Safri, *Pengantar Perpajakan*, Granit Kelompok Yayasan Obor Indonesia, 2005
- Richupan, Somchai. 'Determinants of Income Tax Evasion'. dalam Ved P. Gandhi. 'Relevance of Supply-Side Tax Policy to Developing Countries: a Summary'. *Supply-Side Tax Policy its Relevance to Developing Countries*. Washington DC: IMF, 1987. Reprinted 1995.
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. *perpajakan teori dan aplikasi*. jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- R, Mansury. *Kebijakan Fiskal*. Tangerang: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4). 1999.
- _____, *The Indonesian Income Tax, A Case Study in Tax Reform of A Developing Country*. Singapore: Asian-Pasific Tax and Investment research Centre. 1992.
- _____, *Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000*. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan penyebaran pengetahuan perpajakan (YP4). 2002.
- Setiawan, Agus. *PPh Pemotongan & Pemungutan*. PT Raja Grafindo Perkasa. 2006.
- Stewart, David W. *Secondary Research: Information Sources and Methods*. Newsbury Park: Sage Publications, 1984.
- Surahmat, Rachmanto *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Sebuah Pengantar*, PT Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan ArhurAndersen Prasetion Utomo, Jakarta, 2001
- Van der Heeden, Koenraad. 'The Pay-As-You-Earn Tax on Wages'. dalam Victor Thurony. editor. *tax Law Design and Drafting*. Volume 2. Washington DC: International Monetary Fund: 1998;).
- Yudkin, Leon *Alegal Structure for effective Income Tax Administration*. Harvard Law School. Cambrige. 1971.

Waterhouse, Price, *corporate taxes a worldwide summary*, price waterhouse world firm services BV, Inc, Printed in USA, 1995.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1959 tentang Pajak Dividen (lembaran negara Nomor 105 Tahun 1959).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Dividen 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 2942)

_____ Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor: 3263)

_____ Nomor 7 Tahun 1991 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor: 3459)

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-421/PJ.43/1991 tanggal 27 Desember 1991 tentang penunjukan Wajib Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, tanggal 1 Januari 1992

_____ Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor: 3567)

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-50/PJ.1994 tentang penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi tertentu sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, tanggal 27 Desember 1994

_____ Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 3985)

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-10/PJ/1995 tentang Perkiraan Penghasilan Neto Yang Digunakan Sebagai Dasar Pemotongan Pajak

penghasilan dan Jenis Jasa Lain Yang Atas Imbalannya Dipotong Pajak Penghasilan. Tanggal 31 Januari 1995

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-76/PJ/1995 tentang Perkiraan Penghasilan Neto Yang Digunakan Sebagai Dasar Pemotongan Pajak penghasilan dan Jenis Jasa Lain Yang Atas Imbalannya Dipotong Pajak Penghasilan. Tanggal 2 Oktober 1995

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-59/PJ/1996 tentang Perkiraan Penghasilan Neto Yang Digunakan Sebagai Dasar Pemotongan Pajak penghasilan dan Jenis Jasa Lain Yang Atas Imbalannya Dipotong Pajak Penghasilan. Tanggal 5 Agustus 1996

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-128/PJ/1997 tentang Perkiraan Penghasilan Neto Yang Digunakan Sebagai Dasar Pemotongan Pajak penghasilan dan Jenis Jasa Lain Yang Atas Imbalannya Dipotong Pajak Penghasilan. Tanggal 22 Juli 1997

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-176/PJ/2000 tentang Perkiraan Penghasilan Neto Yang Digunakan Sebagai Dasar Pemotongan Pajak penghasilan dan Jenis Jasa Lain Yang Atas Imbalannya Dipotong Pajak Penghasilan. Tanggal 26 Juni 2000

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 541 / KMK.04 / 2000 tentang penyetoran dan pelaporan pajak

Peraturan Pemerintah Nomor: 140 Tahun 2000 tentang jasa konstruksi, tanggal 1 Januari 2001

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-96/PJ/2001 tentang Perkiraan Penghasilan Neto Yang Digunakan Sebagai Dasar Pemotongan Pajak penghasilan dan Jenis Jasa Lain Yang Atas Imbalannya Dipotong Pajak Penghasilan. Tanggal 7 Februari 2001

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-305/PJ/2001 tentang Perkiraan Penghasilan Neto Yang Digunakan Sebagai Dasar Pemotongan Pajak penghasilan dan Jenis Jasa Lain Yang Atas Imbalannya Dipotong Pajak Penghasilan. Tanggal 18 April 2001

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-170/PJ/2002 tentang Perkiraan Penghasilan Neto Yang Digunakan Sebagai Dasar Pemotongan Pajak penghasilan dan Jenis Jasa Lain Yang Atas Imbalannya Dipotong Pajak Penghasilan. Tanggal 28 Maret 2002

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-178/PJ/2006 tentang Perkiraan Penghasilan Neto Yang Digunakan Sebagai Dasar Pemotongan Pajak

penghasilan dan Jenis Jasa Lain Yang Atas Imbalannya Dipotong Pajak Penghasilan. Tanggal 26 Desember 2006

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-70/PJ/2007 tentang Perkiraan Penghasilan Neto Yang Digunakan Sebagai Dasar Pemotongan Pajak penghasilan dan Jenis Jasa Lain Yang Atas Imbalannya Dipotong Pajak Penghasilan. Tanggal 9 April 2007

Sumber Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85)

Lain-Lain

Bambang Heru Ismiarso, *SIN Mampu Mengantisipasi kenaikan Wajib Pajak*, Majalah berita pajak n0.1524/tahun XXXVII, <http://www.kanwilpajakwpbesar.go.id>

Basri, Faisal. *Withholding tax, cara gampang cari uang*. Indonesian Tax Review. volume II. nomor 2. 2005.

Gunadi. *sistem dan visi perpajakan indonesia*. berita pajak. Maret 1999.

Faiz, Malik. *Penerapan PPh final dalam sistem self assessment ditinjau dari asas keadilan*. Berita Pajak. 2004.

Muin, Razmal. *Kewajiban Memotong atau Memungut PPh*. Indonesian Tax Review. no.11 2004.

Internet

http://www.revenue.alabama.gov/Withholding/whbooklet_0108.pdf.

http://www.bir.gov.ph/taxinfo/tax_withld.htm

http://www.jetro.go.jp/en/invest/setting_up/laws/section3/page4.html

<http://209.85.175.104/search?q=cache:ZUIfaJ94CoAJ:kipfweb.kipf.re.kr/english/file/koica.pdf+overview+of+korean+withholding+tax&hl=id&ct=clnk&cd=10&gl=id>

<http://209.85.175.104/search?q=cache:sMXL5TSkLKMJ:www.hsbcnet.com/transaction/attachments/pcm/pdf/uae.pdf+united+arab+emirates+withholding+tax&hl=id&ct=clnk&cd=7&gl=id>

www.state.vt.us/tax

<http://www.mail-archive.com/ekonominasional@yahoogroups.com/msg04948.html>

